

ABSTRAK
PENGELOLAAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PENGELOLAAN KEBUN BINATANG SURABAYA)

Adanya berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mencoba hadir untuk mengatasinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, sebagai perusahaan daerah yang berwenang untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya. Setelah itu, pada tanggal 13 Agustus 2014, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan surat keputusan No. SK.677/Menhut-II/2014 yang menyatakan pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang kepada PD. Taman Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Namun, pada tanggal 20 Oktober 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN.Jkt yang salah satu amarnya berisi putusan menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin sebagai lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Makna pengelolaan tanah aset milik pemerintah daerah. (2) *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 57/G/LH/2016/PTUN.Jkt. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya, dimana pada dasarnya Kebun Binatang Surabaya merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Kebun Binatang Surabaya, Aset Pemerintah

ABSTRACT
MANAGEMENT OF REGIONAL GOVERNMENT ASSETS
(CASE STUDY OF MANAGEMENT OF KEBUN BINATANG SURABAYA)

The existence of various problems that arise in the management of the Surabaya Zoo, Surabaya City Government tried to attend to overcome this by establishing the Surabaya City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning the Surabaya Zoo Animal Park Regional Company, as a regional company authorized to manage the Surabaya Zoo. After that, on August 13, 2014, the Minister of Forestry issued Decree No. SK.677 / Menhut-II / 2014 which states that granting permits as a Conservation Institution in the Form of Zoos to PD. Surabaya Zoo Park in East Java Province. However, on October 20, 2016, the Jakarta State Administrative Court through Decision Number: 57 / G / LH / 2016 / PTUN. Jkt, which included one of the ruling, stated that the Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia was canceled S.677 / Menhut-II / 2014 concerning Granting Permits as a conservation institution in the form of zoos to PD. Surabaya Zoo Animal Park in East Java Province August 13, 2014.

As for the formulation of the problem in this study are: (1) The meaning of the management of land assets owned by the regional government. (2) Decision ratio Ratio of State Administrative Court Number: 57 / G / LH / 2016 / PTUN. Jkt. The results of this study are expected to provide legal certainty to the Surabaya Zoo Animal Park Company to manage the Surabaya Zoo, where Surabaya Zoo is basically an asset of the Surabaya City Government.

Keywords: Management, Kebun Binatang Surabaya, Government Assets.